

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh atas pembatalan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum = The legal protection on worker labourer for the cancellation regulation of DKI Jakarta Governor on approval for suspension of minimum wage implementation

Moh Yuda Sudawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433639&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Adanya kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastian hukum, dimana Upah Minimum sebagai safety net yang ditetapkan pemerintah menjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut.

Dampak terhadap penetapan upah minimum tersebut biasanya dialami oleh pekerja/buruh dan pengusaha. Pekerja/buruh menganggap bahwa besaran UMP yang ditetapkan Gubernur terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tak jarang mereka melakukan usaha-usaha seperti mogok kerja atau unjuk rasa agar Gubernur meninjau ulang besaran upah minimum. Di sisi lain, banyak pengusaha menganggap UMP tersebut terlalu tinggi. Sehingga, kesulitan untuk membayarnya. Namun, ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi beban pengusaha tersebut, yaitu pengusaha dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT dan Putusan Banding No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT, terkait lingkup perburuhan, pengaturan mengenai penangguhan UMP masih perlu ditinjau ulang, khususnya terkait batas waktu kelengkapan berkas dalam mekanisme pengajuan penangguhan UMP.

Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dengan serikat/pekerja sebagai prasyarat kerap dilalui dengan upaya intimidasi yang dilakukan oleh pengusaha yang bertentangan dengan hukum. Ada terobosan yang dikeluarkan majelis hakim. Salah satunya, serikat pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat menggugat ke PTUN.

Penyelesaian hukum terhadap pembatalan penangguhan upah minimum, selain memberikan kepastian hukum terhadap kelompok buruh/pekerja, juga menimbulkan konsekuensi lain dan bentuk penyelesaian konsekuensi tersebut akan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial apabila pihak perusahaan yang dinyatakan batal keputusan pelaksanaan penangguhan upah tidak menjalankan kewajibannya yaitu untuk membayarkan upah sebesar UMP di tahun

2013

**ABSTRACT
**

The policy for wage suspension bring out a legal insecurities, whereas the minimum wage that should act as a safety net set by the government becomes uncertain because it is possible to rule out those law. The effect of minimum wage act usually affect worker/labourer and business owner. Worker/labourer are assuming that the amount of Provincial Minimum Wage (PMW) that set by governor is too low comparing the cost of living they regularly spent. It is not infrequently they make efforts to protest those such as act of strikes or demonstrations so that the Governor can review the amount of minimum wage. On the other hand, many business owner considering that the PMW is too high and that makes it hard to cover. But there is still a way to anticipate the business owner load such as apply a suspension request addressed to the Governor in accordance with the Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 on Procedures for the Suspension of Minimum Wage Implementation.

In a Jakarta Civil Court of Justice (PTUN) judgment No. 62/G/2013/PTUN-JKT and its appeal on No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT related to the scope of labor, regulation for PMW suspension is still in need of reviewing, specifically on the deadline for submission of the complete file in the mechanism of PMW suspension. In the case of illegal business owner intimidation that often found on worker/labour union and business owner agreement as a prerequisite, a breakthrough are issued by the judges, such as labour union is now considered as a legal subject that have right to file a suit to PTUN.

Legal settlement against Suspension of Minimum Wage Implementation, not only giving a legal security for worker/labour but also gives another consequences and those consequence settlement will be processed in Industrial Relations Court if the business owner is declared void to cancel the suspension of minimum wage implementation if business owner is not perform their duties to pay the worker/labour wage according to PMW in 2013.